P-ISSN :2657-1269
E-ISSN : 2656-9523

POLA PENDEKATAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (*MBM*) DI MADRASAH IBTIDAIYYAH

Elga Yanuardianto
Dosen Universitas Islam Jember Fakultas Tarbiyah
elgayanuardianto1987@gmail.com

ABSTRACT

In the era of madrasa independence, especially in MI and the era of Madrasah-Based Management (MBM), the first and foremost task and responsibility of madrasah leaders is to make the madrasas they lead more effective, in the sense of becoming more useful for the madrasa itself and for the community. the wider community of users. In order for the duties and responsibilities of the madrasah leaders to become real, it would be necessary for them to understand, explore, and apply some of the concepts of management science that have been developed by thinkers in the business world. When seriously deepened, the concepts of management science may have value (in terms of values) that will not plunge our world of education into a business that can harm or disappoint the wider community of its users. MBM is one form of education reform, which offers schools to provide better and adequate education for students. Autonomy in management has the potential for schools to improve staff performance, offer direct participation to relevant groups and increase public understanding of education. In line with the spirit and spirit of decentralization and autonomy in the field of education, school authority also plays a role in accommodating the general consensus that believes that wherever possible decisions should be made by those who have the best access to local information, who are responsible for implementing policies and who are affected by policies. the policy. So that MI which uses madrasah-based management has the authority to regulate its own madrasa in order to achieve its goals. In other words, the MI has the right to empower its potential, both the potential of madrasa residents and the potential of the community. Thus, the leadership and governance that is owned must support the success of the goals that have been set.

Keywords: based management, madrasah ibtidaiyah, school

ABSTRAK

Dalam era kemandirian madrasah khususnya di MI dan era Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), tugas dan tanggung jawab yang pertama dan yang utama dari para pimpinan madrasah adalah menciptakan madrasah yang mereka pimpin menjadi semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi madrasah itu sendiri dan bagi masyarakat luas penggunanya. Agar tugas dan tanggung jawab para pimpinan madrasah tersebut menjadi nyata, kiranya mereka perlu memahami, mendalami, dan menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen yang dewasa ini telah dikembangkan oleh pemikir-pemikir dalam dunia bisnis. Manakala diperdalam secara sungguh-sungguh, kiranya konsep-konsep ilmu manajemen tersebut memiliki nilai (dalam arti values) yang tidak akan menjerumuskan dunia pendidikan kita ke arah bisnis yang dapat merugikan atau

mengecewakan masyarakat luas penggunanya. MBM merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam menejemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kekelompok-kelompok yang terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan, kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum yang meyakini bahwa sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi setempat, yang bertanggung jawab atas pelaksanan kebijakan dan yang terkena kebijakan-kebijakan tersebut. Sehinga MI yang menggunakan manajemen berbasis madrasah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri madrasahnya itu agar dapat mencapai tujuan. Dengan kata lain, MI tersebut berhak untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya baik itu potensi warga madrasah maupun potensi masyarakatnya. Dengan demikian maka kepemimpinan dan tata pengelolaan yang dimiliki haruslah menunjang untuk keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan.
Kata kunci: manajemen berbasis madrasah, madrasah ibtidaiyah, sekolah

PENDAHULUAN

Upaya untuk memajukan kualitas masyarakat melalui pendidikan umum yang terintegrasi dalam lingkungan pesantren terjadi sejak pada masa politik kolonial Belanda, kemunculan madrasah di Indonesia dari "perut" pesantren mengharuskan pesantren siap menjadi kiblat bagi pengembangan madrasah.

Dalam konteks perbaikan manajemen madrasah, kita tidak bisa meninggalkan kaidah-kaidah umum manajemen,[1] karena dalam sebuah institusi dan lembaga akan menjadi sangat urgen, itu disebabkan manajemen dapat mengarahkan dan memberikan andil yang begitu besar dan kuat. Beberapa perbaikan pada lembaga pesantren yang menyangkut masalah sistem dan manajemen bisa dijadikan elan vital untuk perbaikan dan pengembangan lembaga pendidikan madrasah di masa depan.

Sistem manajemen pendidikan yang sentralistis telah terbukti tidak membawa kemajuan yang berarti bagi kualitas pendidikan pada umumnya. Bahkan telah terjadi pemandulan kreatifitas pada satuan pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Upaya mengatasi stagnasi dibidang pendidikan diperlukan adanya paradigma baru maka peluang tersebut semakin tampak nyata setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi pendidikan melalui strategi pemberlakuan managemen berbasis madrasah/sekolah

[1] Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Yogyakarta: Lista Fariska Putra, 2005. hlm 55.

(MBM/S). MBS bukan sekedar mengubah pendekatan pengelolaan sekolah dari sentralistis ke desentralistis, tetapi lebih dari itu melalui MBS diyakini akan muncul kemandirian.

PEMBAHASAN

Konsep Manajemen Berbasis Madrasah

School based managemen istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat [2] ketika tidak ada kepastian atau andil dan masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat, yang kemudian manajemen berbasis sekolah terjemahannya berupa manajemen berbasis madrasah(MBM).[3]

Manajemen berbasis madrasah merupakan dari istilah Manajamen berbasis madrash atau sering di singkat MBM merupakan paradikma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolan (pelibatan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan nasional). Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu, dan mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam pada itu, kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh sekolah. Pada sistem MBM, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggung jawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.[4]

MBM merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Otonomi dalam menejemen merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan partisipasi langsung kekelompok-kelompok yang terkait dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Sejalan dengan jiwa dan semangat desentralisasi serta otonomi dalam bidang pendidikan, kewenangan sekolah juga berperan dalam menampung konsensus umum yang meyakini bahwa sedapat mungkin keputusan seharusnya dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling baik terhadap informasi setempat, yang bertanggung jawab atas pelaksanan kebijakan dan yang terkena kebijakan-kebijakan tersebut.

---

[2] Agus Dharma, *Manajemen Berbasis Sekolah,* (Jakarta: Pendidikan Network, http://re-searchengines.com/adharma2.html, 2003), hlm. 1

[3] Syafaruddin, *Efektivitas kebiijakan Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 155

[4] Abdul, Rachman Shaleh,, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, misi dan aksi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.. hlm. 226

Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBM yang dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan. *Pertama*, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan Guru; *Kedua,* bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal; *Ketiga*, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah; *Keempat,* adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, menejemen sekolah, rancangan ulangan sekolah dan perubahan perencanaan.[5]

Manajemen Berbasis Madrasah merupakan proses pengintegrasian, pengkoordinasian dan pemanfaatan dengan melibatkan secara menyeluruh elemen-elemen yang ada pada madrasah untuk mencapai tujuan (mutu pendidikan) yang diharapkan secara efisien. MBM adalah model manajemen yang memberikan otonomi (kewenangan) yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan yang partisipatif yaitu melibatkan semua warga madrasah berdasarkan kesepakatan bersama.

Otonomi pendidikan memberikan kesempatan luas terhadap madrasah melalui kemandirian dan keberdayaannya dalam bingkai keislman dan kemasyarakatan. [6]Dengan adanya otonomi (kewenangan) yang lebih besar diharapkan madrasah dapat menggunakan dan mengembangkan kewenangan secara mandiri dalam mengelola madrasah dan memilih strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan serta dapat memilih pengembangan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan madrasah.

Karakteristik dan Komponen Manajemen Berbasis Madrasah

Secara sederhana pola karakteristik yang diberikan MBM dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1

Karakteritik MBM berdasarkan Perubahan Pola Manajemen Pendidikan[7]

Pola Lama		**Pola Baru**
Subordinasi		Otonomi
Pengambilan keputusan		Pengambilan keputusan

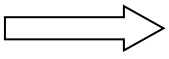

[5]Nanang Fattah, Manajemen berbasis Sekolah, Bandung; Andira. 2000 .hlm.31

[6] Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Yogyakarta: Lista Fariska Putra, 2005.h. 114.

[7]Sumber: diadaptasi dari http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html, hlm. 6.

terpusat		partisipatif
Ruang gerak kaku		Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik		Pendekatan profesional
Sentralistik		Disentralistik
Diatur		Motivasi
Overegulasi		Deregulasi
Mengontrol		Mempengaruhi
Mengarahkan		Menfasilitasi
Menghindari resiko		Mengelola resiko

Sumber: diadaptasi darihttp://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html.

Maka melihat perubahan pola di atas karakterisitk manajemen barbasis sekolah tentunya tidak terlepas dari pendekatan input, proses, output pendidikan[8], yang terjabar pada berikut ini:

1. Input Pendidikan

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsunnya proses.[9] Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (Kepala Madrasah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan sebagainya. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran- sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.[10]

Secara ringkas karakteristik MBM ditinjau dari segi input terdiri dari empat hal yaitu: 1) memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas, 2) tersedianya sumber daya

[8]Sekolah yang mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah atau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah perlu memiliki sekolah efektif, maka secara inklusif memuat elemen-elemen yang dikategorikan tersebut.

[9] Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta. 2010. hlm. 163.

[10]Mulyasa. E , Manajemen Berbasis Madrasah, (Remaja Rosdakarya., Bandung, 2004) hal 11

yang kompetitif dan berdedikasi, 3) memiliki harapan prestasi yang tinggi, dan 4) komitmen pada pelanggan.[11]

2. Proses Pendidikan

Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input output. Dalam pendidikan bersekala mikro (ditingkat madrasah), proses yang dimaksud adalah proses pengembilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding dengan proses- proses lainnya. secara ringkas karakteristik MBM ditinjau dari segi proses terdiri dari beberapa yaitu: 1) efektivitas dalam proses belajar mengajar tinggi, 2) kepemimpinan yang kuat, 3) lingkungan madrasah yang nyaman, 4) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, 5) tim kerja yang kompak dan dinamis, 6) kemandirian, partisipatif dan keterbukaan (transparasi), 7) evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, dan 8) responsif, antisipatif, komunikatif dan akuntabilitas.[12]

3. Output yang diharapkan

Pada dasarnya output yang diharapkan merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan secara umum. Output pendidikan adalah merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiendinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. [13] Khusus yang berkaitan dengan mutu output madrasah, dapat dijelaskan bahwa output madrasah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi madrasah, khusunya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesenian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ektsrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

[11]BPPN dan Bank Dunia, School Based Manajemen, Jakarta 1999 hal ..

[12]Suyanto, *Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah,* (Wonosobo: Makalah SMK 2 Wonosobo, 2008), h. 4.

[13]Lihat juga di Syafaruddin, *Efektivitas kebiijakan Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 178-180

Komponen yang harus dikelola dalam rangka MBS:

1. Kurikulum dan program pembelajaran
2. Tenaga kependidikan
3. Kesisiwaan
4. Pembiyaan
5. Sarana dan prasarana pendidikan
6. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat.
7. Manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan.[14]

Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Madrasah

MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dengan maksud agar madrasah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Pada sistem MBM madrasah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggung jawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBM juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada madrasah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi siswa. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendidikan.

Pengertian MBM sebagai suatu konsep yang menempatkan kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar. Kewenangan terhadap pembelajaran di serahkan kepada unit yang paling dekat dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri yaitu madrasah. Di samping itu untuk memberdayakan madrasah agar dapat melayani masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut.

1. Tujuan Manajemen Berbasis Madrasah

Tentu dalam tataran manajemen ini yang dibuat itu memiliki maksud tersendiri maka tujuan dan maksud dari penerapan MBM adalah untuk:[15]

a. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.

[14]Abdul, Rachman Shaleh,, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, misi dan aksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 230-233

[15]Exsa, *Perbandingan Manajemen Berbasis Sekolah Dengan Manajemen Berbasis Madrasah*, (http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/perbandingan-manajemen-berbasis-sekolah-dengan-manajemen-berbasi-madrasah, 2009), hlm. 5

b. Memperoleh masukan agar konsep ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman cultural, sosio ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografinya.
c. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat madrasah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.
d. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu pendidikan/ pada madrasah masing-masing.
e. Menggalang kesadaran masyarakat madrasah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.
f. Memotivasi timbulnya pemikira-pemikiran baru dalam mensukseskan pembanguan pendidikan dari individu dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan khususnya masyarakat madrasah yang berada di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.
g. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan pada tataran madrasah.
h. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun, 5 tahun dan seterusnya sehingga tercapai misi madrasah ke depan.[16]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sudah jelas secara politis manajemen berbasis madrasah ekolah merupakan muara dari semua kebijakan di bidang pendidikan akan tergambar di madrasah, sebab sekolah merupakan jaringan terakhir dari rangkaian birokrasi pendidikan. MBM juga sebagai bentuk operasionalisasi dari kebijakan desentralisasi atau otonomi pendidikan dalam hubungannya dengan otonomi daerah. Secara teoritis MBM juga merupakan suatu konsep yang menawarkan suatu otonomi kepada madrasah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara madrasah, masyarakat dan pemerintah. Secara operasional MBM merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan madrasah dalam suatu keutuhan entitas sistem.

[16] Lihat juga, Mulyasa E. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 97-120

Berdasarkan beberapa paparan tentang manajemen berbasis madrasah seperti diatas, dapat dimengerti bahwa mutiara dari semua kebijakan di bidang pendidikan akan tergambar disekolah, sebab madrasah merupakan jaringan tekir dari rangkaian birokrasi pendidikan. Maka, hidup atau matinya suatu program akan ditentukan oleh sejauh semana madrasah mampu mengelola dan melaksanakan semua program kependidikan. Oleh sebab itu, manajemen berbasis madrasah menjadi sangat strategis dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dengan manajemen berbasis madrasah ini, kepala madrasah, guru dan peserta didik mendapatkan peluang untuk melakukan inovasi dan improvisasi di madrasah berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial dan lain-lain. Jadi, otonomi pendidikan merupakan hal yang esensial bagi terciptanya kebebasan akademik. Dengan demikian, manajemen berbasis madrasah dikatakan sebagai bentuk oprasionalisasi desentralisasi atau otonomi pendidikan dalam hubungannya dengan otonomi daerah.

2. Manfaat Manajemen Berbasis Madrasah

MBM dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBM adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan dearah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBM pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBM memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka.

Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBM dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBM adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.

Melalui MBM dinyakini bahwa prestasi belajar murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus

menerapkannya tidak berperanserta merencanakan-nya. Pendekatan melalui MBM juga memiliki lebih semua banyak masalahnya ketimbang pengambilan keputusan yang terpusat. Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka, serta menciptakan keseimbangan yang pas antara anggaran yang tersedia dan prioritas program pembelajaran. Pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan meningkatkan motivasi dan komunikasi (dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid. MBM bahkan dipandang sebagai salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan guru dan staf yang berkualitas tinggi.

Penerapan MBM yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat yaitu:

a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
b. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
c. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
d. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di level.[17]

Pendekatan Pembelajaran Madrasah di MI

Di era otonomi pendidikan ini, ada beberapa yang harus dilakukan Madrasah Ibtidaiyyah *Pertama,* mengakomodasi berbagai masukan dan kritik dari steakholders, sekaligus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. *Kedua,* madrasah hendaknya menjadi lembaga iklusif dan universal yang mampu keluar dari jebakan-jebakan dikotomis yang selama ini

[17] Direktorat Pendidikan Luar Biasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2008, hal. 7

melingkupi keilmuan di lembaga ini. *Ketiga,* madrasah harus responsive terhadap berbagai perubahan dan kebutuhan masyarakat.[18]

Disamping itu pola interaksi MI dengan masyarakat, hubungan guru dengan masyarakat (Hubugan kepsek/guru dan orang tua, kepsek/guru dan pakar pendidikan), dan pola pembelajaran berbasis siswa/ santri menjadi ciri khas dan keunikan yang dikembangkan manajemen berbasis madrasah.

MI yang menggunakan Manajemen Berbasis Madrasah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri madrasahnya itu agar dapat mencapai tujuan. Dengan kata lain, MI tersebut berhak untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya baik itu potensi warga madrasah maupun potensi masyarakatnya. Dengan demikian maka kepemimpinan dan tata pengelolaan yang dimiliki haruslah menunjang untuk keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan.

Hambatan Dalam Penerapan MBM di MI

Ada beberapa Hambatan logis yang mungkin dihadapi pihak-pihak berkepentingan dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah terutama di MI adalah:

1. Kurangnya Minat Keterlibatan.

Banyak orang yang hanya berfokus pada pekerjaan yang diwajibkan. Pekerjaan tambahan yang dibutuhkan dalam pengelolaan MBS praktis membuat sebagian orang berat untuk menerimanya kecuali yang benar-benar terpanggil untuk melakukan perubahan. Para anggota komite sekolah diharuskan lebih banyak menggunakan waktunya untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan anggaran disekolah. Akibatnya kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak semua guru akan berminat dalam proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan itu.[19]

2. Tidak Efisien.

Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya menimbulkan frustrasi dan sering kali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu.

3. Pikiran Kelompok.

[18] Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Yogyakarta: Lista Fariska Putra, 2005.h.114-133.

[19] Lukman Hakim, *MBS Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Jambi: Timur Laut Aksara, 2019, h. 15

Setelah beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan semakin kohesif. Di satu sisi hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota terlalu kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota lainnya. Pada saat inilah dewan sekolah mulai terjangkit pikiran kelompok. Ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak lagi realistis.

4. Mmbutuhkan Pelatihan.

Pihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Sehingga harus ada pelatihan yang khusus dalam memahamkan stakeholder tentang hakikat MBS, menjalankan maekanisme manajement, memahami system otorites serta pendelegasian, sampai pada manajement pengambilan keputusan.

5. Kebingungan Atas Peran dan Tanggung Jawab Baru.

Pengelola yang terlibat tentunya telah sangat terkondisi dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Dengan adanya penerapan MBS tentunya mengubah serta menambah peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan. Karena Kehadiran MBS pada satu sisi memang merupakan suatu pengetahuan baru yang penting dalam mencapaian tujuan pendidikan, namun di sisi lain tentu membingungkan karena pengelola harus beradaptasi cukup lama dalam hal peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan.

6. Kesulitan Koordinasi.

Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendiri yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah. Apabila pihak-pihak yang berkepentingan telah dilibatkan sejak awal, mereka dapat memastikan bahwa setiap hambatan telah ditangani sebelum penerapan MBM. Dua unsur penting adalah pelatihan yang cukup tentang MBM dan klarifikasi peran dan tanggung jawab serta hasil yang diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, semua yang terlibat harus memahami apa saja tanggung jawab pengambilan keputusan yang dapat dibagi, oleh siapa, dan pada level mana dalam organisasi.

PENUTUP

Konsep pendidikan yang berpola Manajemen Berbasis Madrasah adalah konsep yang menggali potensi yang ada di masyarakat dan lingkungan pendidikan. MBM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam hal penguasaan ilmu dan teknologi. Dan tujuan utama MBM (manajeman berbasis madrasah) adalah meningkatkan efesiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Dalam berimplementasi MBM/MBS menuntut dukungan tenaga kerja professional, terampil, dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang produktif. Khususnya kepala sekolah, guru, calon guru dan dewan sekolah/madrasah serta tokoh masyarakat yang bertanggung jawab dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pendidikan di Madarasah.

Melalui MBM dinyakini bahwa prestasi belajar murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperanserta merencanakan-nya. Pendekatan melalui MBM juga memiliki lebih semua banyak masalahnya ketimbang pengambilan keputusan yang terpusat. Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka, serta menciptakan keseimbangan yang pas antara anggaran yang tersedia dan prioritas program pembelajaran. Pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan meningkatkan motivasi dan komunikasi (dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid. MBM bahkan dipandang sebagai salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan guru dan staf yang berkualitas tinggi.

MI yang menggunakan Manajemen Berbasis Madrasah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri madrasahnya itu agar dapat mencapai tujuan. Dengan kata lain, MI tersebut berhak untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya baik itu potensi warga madrasah maupun potensi masyarakatnya. Dengan demikian maka kepemimpinan dan tata pengelolaan yang dimiliki haruslah menunjang untuk keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan.

REFERENSI

1. BPPN dan Bank Dunia, *School Based Manajemen*, Jakarta 1999.
2. Dharma Agus, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah,* Jakarta: Pendidikan Network http://re-searchengines.com/adharma2.html.
3. Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2008, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa.
4. Exsa, 2009 *Perbandingan Manajemen Berbasis Sekolah Dengan Manajemen Berbasis Madrasah*, http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-makalah-tentang/perbandingan-manajemen berbasis- sekolah-dengan-manajemen-berbasi-madrasah.
5. Fattah, Nanang, 2000, *Manajemen berbasis Sekolah*, Bandung; Andira.
6. Hakim, Lukman, 2019, *MBS Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Jambi: Timur Laut Aksara.
7. http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html,
8. Mulyasa E, 2004, *Manajemen Berbasis Madrasah*, PT Remaja Rosdakarya., Bandung.
9. Sagala Syaiful, 2010, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,* Bandung: Alfabeta.
10. Suparta, Mundzier dan Amin Haderi, 2004, *Manajemen Pondok Pesantren,* Jakata: Diva Pustaka.
11. Suyanto, 2008, *Perumusan Manajemen Berbasis Sekolah*, Wonosobo: Makalah SMK 2 Wonosobo.
12. Shaleh, 2004, Abdul, Rachman, *Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, misi dan aksi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
13. Syafaruddin, 2008, *Efektivitas kebiijakan Pendidikan,* Jakarta: Rineka Cipta.
14. Ta'arifin, Ahmad dan Ainurrafiq Dawam. 2005, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*. Yogyakarta: Lista Fariska Putra.